



## Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>  
E-ISSN 2721-3617

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

**Mattoasi<sup>a</sup>, Didiet Pratama Musue<sup>b</sup>, Yaman Rauf<sup>c</sup>**

**a, b, c Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia**

**email: [Mattoasi@ung.ac.id](mailto:Mattoasi@ung.ac.id)<sup>a</sup>, [vandidit26@gmail.com](mailto:vandidit26@gmail.com)<sup>b</sup>, [yamanrauf095@gmail.com](mailto:yamanrauf095@gmail.com)<sup>c</sup>**

#### INFO ARTIKEL

***Riwayat Artikel:***

*Received 19-07-2021*

*Revised 03-08-2021*

*Accepted 06-08-2021*

***Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kinerja Pemerintah Daerah***

***Keywords: Government Internal Control System, Local Government Performance***

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Studi Kasus Di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dan sumberdatanya menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada responden. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan uji statistik t-test dan uji koefisien determinasi (ajusted R-Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan nilai determinan sebesar 48,7%. Hasil penelitian ini memberi sumbangsi kepada pemerintah agar dapat menetapkan dan menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang lebih efektif.

#### ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of the internal control system on the performance of local government Case Study in Gorontalo Regency. This study uses quantitative research methods, and the data sources use primary data obtained from questionnaires distributed to respondents. Meanwhile, the data analysis used in this research is descriptive quantitative analysis using statistical t-test and coefficient of determination test (ajusted R-Square). The results showed that the internal control system had a positive effect on the performance of local governments with a determinant value of 48.7%. The result of this study contribute to the government to establish and implement a more effectives Internal Constrol Systems (ICS).*

## PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik selalu dituntut agar memiliki kinerja yang ditujukan pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk tanggap terhadap lingkungan disekitarnya, dengan cara memberikan upaya pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas, serta adanya pembagian tugas yang baik pada suatu struktur organisasi pemerintahan. Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau manajerial organisasi tersebut (Nengsy, 2017).

Berkaitan dengan kinerja, maka salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kinerja pemerintah desa pada organisasi sektor publik, dapat dilihat dari proses perencanaan, karena suatu perencanaan dapat menentukan keberhasilan suatu program kegiatan (Kusnendar, 2018). Namun, berbeda dengan Bahgia (2020) & Wiwaha dan Suryathi (2018) menyatakan bahwa kinerja tidak dapat dilihat dari input atau perencanaan program saja, tetapi lebih ditekankan kepada jalannya proses, output, manfaat, dan outcome dari program kegiatan tersebut bagi kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan kinerja Pemerintahan, Badan pengelolaan keuangan daerah (BPKD) merupakan salah satu instansi pemerintah yang berada di Kabupaten Gorontalo melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah dibidang keuangan dan aset daerah sebagai tugas pokok. Akan tetapi pada badan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gorontalo dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan masih terdapat beberapa kendala dalam sistem informasi yaitu kebijakan dalam pemakaian aplikasi yaitu SIMDA (Sistem Informasi Daerah) keuangan yang kurang memadai karena masalah jaringan yang terkendala sehingga dalam mengimput data laporan keuangan tidak tepat pada waktunya serta keterlambatan dalam up-date sistem yang selalu berubah. (Sumber: Kabupaten Gorontalo, 2021) Sehingga Kondisi kinerja suatu organisasi terutama dalam instansi pemerintah harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu khususnya bagi pegawai yang bersangkutan untuk mengetahui dan di informasikan kepada pihak- pihak tertentu khususnya bagi pegawai yang bersangkutan untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasioanl yang diambil dalam instansi pemerintah.

Sehingga dalam penyelenggaraan kegiatan demi terciptanya kinerja pada instansi pemerintah, dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjaaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif serta efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah membutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan. Sistem tersebut disebut dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Noviyana & Pratolo, (2018). Hal tersebut sejalan dengan Mokoginta, Lambey, & Pontoh (2017) yang menyatakan bahwa Pengendalian intern dibutuhkan agar mudah dalam menemukan atau menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada atau permasalahan yang mungkin akan timbul dalam proses pencapaian tujuan sehingga pencapaian tujuan bisa kita ketahui secara jelas. Dengan demikian, pengendalian intern dapat mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan dan

pelaporan dalam rangka menciptakan akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat (Aziz, Pratiwi, Suyono, 2018).

Penelitian tentang pengaruh SPIP pernah diteliti oleh Noviyana dan Pratolo (2018) dan Aziz, Pratiwi, dan Suyono (2018) yang menyatakan bahwa SPIP berpengaruh positif terhadap kinerja Instansi Pemerintah akan tetapi menurut Mokoginta, Lambey, dan Pontoh (2017) SPIP berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemerintah. Sehingga perbedaan hasil penelitian tersebut menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian kembali.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini diambil untuk melakukan penelitian kembali dengan objek yang berbeda yaitu pada pemerintah daerah di Kabupaten Gorontalo. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo).

## **KAJIAN PUSTAKA**

### ***Agency Theory (Teori Agensi)***

Teori yang mendasari penulisan rencana penelitian ini adalah teori agensi. Berdasarkan teori agensi yang mengadopsi pendapat Jensen & Meckling (1976), dijelaskan bahwa hubungan rakyat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat sebagai principal yang menggunakan pemerintah sebagai agent untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat. Untuk mengawasi perilaku pemerintah serta menyelaraskan tujuan rakyat dan pemerintah, rakyat mewajibkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah melalui mekanisme laporan keuangan secara periodik. Dari laporan keuangan yang merupakan tanggungjawab pemerintah, rakyat melalui legislatif dapat mengukur, menilai sekaligus mengawasi kinerja pemerintah, sejauh mana pemerintah telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

### **Kinerja Pemerintah Daerah**

Menurut Auditya (2013) Kinerja pemerintah daerah yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya Lubis (2020) dan Muda, Maulana, Siregar, & Indra (2018) menyatakan bahwa kinerja pemerintah daerah merupakan tingkat capaian dari suatu hasil kerja, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat serta secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok, dengan melalui usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhannya secara efektif. Kinerja pemerintah daerah yang baik dapat ditunjukkan dengan indikator akuntabilitas dan transparansi (Asmawati, Basuki, & Riva'i, 2018).

Berdasarkan beberapa uraian berkaitan dengan kinerja, kinerja pemerintah adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi atau individu yang dapat ditunjukkan secara nyata dan dapat diukur. hal ini menunjukkan bahwa pegawai harus mempunyai peranan yang penting dalam suatu organisasi, oleh karena itu seorang pegawai perlu berada pada kondisi yang unggul, artinya mampu mewujudkan perubahan dengan secara inovatif.

### **Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Sistem pengendalian internal Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 yaitu proses yang terintegral pada tindakan dan kegiatan untuk memberikan pemahaman yang memadai tentang tercapainya tujuan dari suatu organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, pengamatan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan pegawai.

### **Hipotesis Penelitian**

Melihat fenomena, teori, dan kerangka konseptual yang telah disajikan menjelaskan bahwa pengendalian internal bagi setiap pemerintah daerah harus ditetapkan sesuai dengan tugas pokok masing-masing, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H1: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Gorontalo?

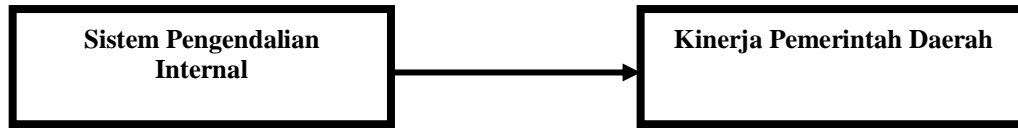
### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berfokus kepada kinerja pemerintah daerah yang bersifat kasuistik. Jenis penelitian yang digunakan untuk mengungkap setiap fenomena yang terjadi melalui penelitian kuantitatif. Untuk menjawab hipotesis maka peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap variabel Sistem Pengendalian Internal (X) dan Variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y). Hasil dari validitas dan reliabilitas dilanjutkan dengan analisis regresi sederhana dengan melihat pengaruh diantara 2 Variabel. Keadaan ini sesuai dengan kehendak Creswell (2016) dan Sugiono (2018) bahwa analisis kausal dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh terhadap suatu variabel dengan variabel yang lain. Fokus pada variabel sistem pengendalian internal disebabkan beberapa penelitian sebelumnya menekankan bahwa variabel ini sangat menentukan di dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah, walaupun sebagian yang lain mengatakan bahwa kurang berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka desain penelitian dalam penelitian ini yang dibuat berdasarkan beberapa teori dan konsep kinerja pemerintah daerah yang dianggap bahwa sangat menentukan kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut dapat dilihat dalam gambar 1.1 berikut.



**Gambar 1.**  
**Desain Penelitian**



Sistem Pengendalian Internal (X)  
Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh melalui kuesioner yang telah ditabulasi dan dianalisis berdasarkan SPSS, maka diperoleh hasil analisis validitas terhadap variabel Sistem Pengendalian Internal (SPI). Dari 6 item pertanyaan, maka dinyatakan bahwa semua item valid karena T-Hitung > daripada T-tabel. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel uji-validitas berikut.

Tabel 1. Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Item pernyataan	Korelasi	Nilai batas	Keseimpulan
X <sub>2.1</sub>	0,629	0,25	Valid
X <sub>2.2</sub>	0,603	0,25	Valid
X <sub>2.3</sub>	0,589	0,25	Valid
X <sub>2.4</sub>	0,745	0,25	Valid
X <sub>2.5</sub>	0,717	0,25	Valid
X <sub>2.6</sub>	0,533	0,25	Valid

Sumber: Data Olahan, 2021

Selain uji validitas sebagai syarat untuk menguji pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap kinerja pemerintah daerah maka dalam penelitian ini juga telah dilakukan uji reliabilitas untuk konsistensi seluruh item di dalam variabel ini. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal (SPI) reliabel dengan total nilai 0.704 lebih tinggi daripada nilai T-tabel.

Selain melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap variabel Sistem Pengendalian Internal (SPI), maka juga dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap variabel kinerja pemerintah daerah. Uji validitas dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Uji Validitas Kinerja pemerintah daerah

Item pernyataan	Korelasi	Nilai batas	Keseimpulan
Y <sub>1</sub>	0,612	0,25	Valid
Y <sub>2</sub>	0,644	0,25	Valid
Y <sub>3</sub>	0,718	0,25	Valid

Y <sub>4</sub>	0,667	0,25	Valid
Y <sub>5</sub>	0,504	0,25	Valid
Y <sub>6</sub>	0,701	0,25	Valid
Y <sub>7</sub>	0,755	0,25	Valid

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa semua item di dalam variabel kinerja dinyatakan valid dengan syarat yang terpenuhi yaitu T-hitung > dari T-tabel. Keadaan ini dinyatakan valid dan nilai reliabel mencapai 0.771 > lebih besar daripada T-Tabel sehingga dapat dilakukan dengan proses pengujian apakah kinerja pemerintah akan meningkat jika variabel X diperbaiki.

Setelah semua pernyataan dinyatakan valid dan reliabel, maka peneliti melakukan uji pengaruh Sistem Pengendalian Internal (X) terhadap Kinerja Pemerintah daerah (Y). Dari hasil analisis tabel 1. pada kolom Unstandardized Coefficients (B) tertera nilai constant a sebesar 8.003 dan sistem pengendalian internal Pemerintah (X) sebesar 0.869. dengan demikian persamaan analisis regresi berganda yang terbentuk adalah:

$$Y = 8.003 + 0.869X + e$$

Dari persamaan analisis regresi sederhana, maka dapat diinterpretasikan bahwa nilai konstanta sebesar 8.003 artinya bahwa jika variabel independen SPIP konstan maka besarnya nilai Y (kinerja pemerintah daerah) dalam pengambilan keputusan sebesar 8.003 satuan. koefisien regresi untuk variabel sistem pengendalian internal (X) yaitu 0.604 artinya jika Sistem Pengendalian Internal mengalami kenaikan 1%, maka kinerja pemerintah daerah meningkat sebesar 86.9%.

### **Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah**

Dari hasil perhitungan uji hipotesis (Uji T) dimana T-hitung sebesar 6.757 > t-tabel 2.01174 dengan hasil signifikansi sebesar 0.000 < 0.05. Nilai ini dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah sebesar 48.7% jika dilihat dari uji R. Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pujiono et al., (2016) bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sebelumnya sejalan juga dengan Lukman, Thatok, & Biana (2016) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berkaitan dengan hasil penelitian ini sejalan dengan Pontoh (2018) menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian internal dapat membantu untuk mencapai tingkat kinerja yang ditargetkan dan mencegah terjadi kehilangan sumber daya. Hal ini juga sejalan dengan Chici (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya diatas menurut Dharmawan (2016) menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang efektif akan berpengaruh terhadap kinerja. Pendapat ini juga didukung oleh Mokoginta, Pontoh, dan Lambey (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Komponen-komponen dalam sistem pengendalian internal seperti lingkungan pengendalian yang baik, akan memberika kontribusi baik dalam menciptakan

suasana kerja sehingga dapat mendorong karyawan untuk meningkatkan kinerjanya.

Sistem pengendalian internal artinya suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi menilai alat ukur material dan non material. Kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. Proses integral pada tindakan dan kegiatan yang secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hal ini sejalan dengan Ana (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah sangat signifikan. Dimana semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah, maka kinerja pemerintah juga semakin baik.

### **SIMPULAN, KETERBATASA, SARAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah (Y) di Kabupaten Gorontalo sebesar 48.7% (Nilai *R-Square*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik pengendalian internal yang ditetapkan dan dilaksanakan maka kinerja pemerintah daerah semakin dapat ditingkatkan. Namun dalam penelitian masih terdapat pengaruh variabel lain yang juga di duga dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja 51.3% namun tidak dikutkan dalam pengujian dalam penelitian ini.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel berbeda untuk lebih mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, seperti variabel partisipasi anggaran dan sistem informasi akuntansi serta kualitas sumber daya manusia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asmawati, I., Basuki, P. A. R., & Riva'i, A. (2018). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(3), 2379–2401.
- Ana, I. U. (2018). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kejelasan Tujuan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Implementasi Akuntansi Akrua, Sistem Pengendalian Intern, Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Klaten (Doctoral Dissertation, Universitas Widya Dharma).
- Auditya, L., Husaini, H., & Lismawati, L. (2013). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah`

- daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 21-42.
- Aziz, N. J. A., Pratiwi, U., & Suyono, E. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Manajerial Aparatur Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20(4).
- Bahgia, S. (2020). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Pemahaman Akuntansi Pemerintahan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial pada Pemerintah Aceh. *Jurnal Emt Kita*, 4(1), 89. <https://doi.org/10.35870/emt.v4i2.144>
- Chici, C. (2017). Pengaruh good governance, sistem pengendalian intern pemerintah dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Fekin*, 4(1), 3110–3123.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Pustaka Pelajar.
- Dharmawan, T. (2016). Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah ( Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 4(1), 941–948.
- Kusnendar, A. (2018). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(3), 1-8.
- Lamusu, L. (2013). pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada DPPKAD KabupatenGorontalo. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–12. [http://elesrning.unisba.ac.id.php/kajian\\_akuntansi/article/view/6354](http://elesrning.unisba.ac.id.php/kajian_akuntansi/article/view/6354)
- Lubis, A. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa Serta Dampak Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Deli Serdang (Doctoral Dissertation).
- Lukman, H., Thatok, & Biana, I. A. (2016). Pengaruh komitmen organisasional, sistem pengendalian internal pemerintah dan gaya kepemimpinan kinerja manajerial (survey pada skpd sumbawa). *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 67–82.
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Muda, I., Maulana, W., Sakti Siregar, H., & Indra, N. (2018). The analysis of effects of good corporate governance on earnings management in Indonesia with panel data approach. *Iranian Economic Review*, 22(2), 599–625.
- Nengsy, H. (2017). Pengaruh Kejelasan sasaran Anggaran Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Manajerial PT. Perkebunan Nusantara V, Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi & Keungan*, 6,1–16.



<http://journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/view/9465/0>

- Noviyana, R. A., & Pratolo, S. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel Intervening: Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 2(2), 129-143.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Pujiono, D. S, Sukarno, H., & Puspitasari, N. (2016). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan keuangan daerah serta kinerja pemerintah daerah (Studi di provinsi maluku utara). *Bisnis Dan Manajemen*, 10(1), 68–81.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r and d*. Alfabeta: Bandung.
- Wiwaha, I. G. D. P., & Suryathi, N. W.(2018).Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Manajerial: Studi Kasus Seluruh Lpd Di Desa Dinas Dalung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 3(2),172-183.

## Lampiran

**Tabel 1**  
**Uji T dan Analisis regresi berganda**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.003	3.537		2.263	.028		
	TOTAL_X	.869	.129	.698	6.757	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: TOTAL\_Y

Sumber data diolah spss 22

**Tabel 2**  
**Uji R**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.698 <sup>a</sup>	.487	.477	2.04945

a. Predictors: (Constant), TOTAL\_X

b. Dependent Variable: TOTAL\_Y

Sumber: diolah SPSS 22

**Tabel 3**  
**Uji Normalitas**

Unstandardized Residual	
N	50
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean
	Std. Deviation
Most Extreme Differences	Absolute
	Positive
	Negative
Test Statistic	
Asymp. Sig. (2-tailed)	
Exact Sig. (2-tailed)	
Point Probability	

Sumber data diolah spss 22